	<p>ATRIUM: JURNAL ARSITEKTUR ISSN: 2442-7756 e-ISSN: 2684-6918 atrium.ukdw.ac.id</p>
---	---

<p>Pendekatan Kolaboratif dalam Menangani Konflik Spasial Kawasan Pesisir di Pantai Selatan Yogyakarta</p>
<p> Diterima pada 1 Februari 2021 Disetujui pada 17 Mei 2021 Tersedia <i>online</i> 25 Mei 2021 DOI http://dx.doi.org/10.21460/atrium.v7i1.149 </p>
<p>Iwan Darmawan¹, Ikaputra² 1. Program Studi Doktor Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2. Associate Profesor, Program Studi Arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email: iwandarmawan.official@gmail.com</p>

<p>Abstrak</p> <p>Ekosistem pesisir pantai selatan Yogyakarta menghadapi peningkatan dampak dari perikanan, budidaya perairan, pariwisata, produksi energi, perkapalan, polusi, perubahan iklim dan pemicu stres lainnya. Tulisan ini membahas mengenai pentingnya jenis perencanaan kolaboratif (<i>collaborative planning</i>), lebih dari berbasis masyarakat (<i>participatory planning</i>) di dalam kawasan wisata pesisir (<i>coastal tourism</i>) sekaligus kawasan konservasi hutan mangrove, serta stressor lingkungan berupa tambak udang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis pemahaman jenis pendekatan perencanaan paling tepat yaitu kolaboratif di kawasan yang memiliki konflik spasial. Metode yang digunakan pada paper ini yaitu studi literatur (<i>literatur review</i>) yang menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan (literatur) untuk dijadikan landasan penelitian dengan menyusun kerangka pemikiran (teori) yang jelas dari perumusan masalah yang ingin dikaji ditambah dengan observasi lapangan. Penulis lalu memberikan ulasan, rangkuman, mendialogkan teori yang kemudian digunakan untuk membangun kerangka teori yang relevan. Referensi literatur yang digunakan berkaitan dengan <i>collaborative planning</i> serta <i>coastal tourism</i>. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi konflik spasial di kawasan wisata pesisir pantai selatan Yogyakarta, jenis perencanaan dengan pendekatan kolaboratif adalah yang paling tepat diterapkan dimana di dalam prosesnya melibatkan stakeholder (banyak pihak penentu) dengan tujuan akhir adalah sebuah kesepakatan bersama (<i>consensus</i>) untuk semua pihak dan berwawasan keberlanjutan (<i>sustainable tourism</i>).</p> <p>Kata kunci: perencanaan kolaboratif, wisata pesisir, pemangku kepentingan, konsesnsus.</p>
--

<p>Abstract</p> <p>Title: <i>A Collaborative Approach to Handling Coastal Spatial Conflicts in Yogyakarta Southern Coast</i></p> <p>Yogyakarta's southern coastal ecosystem is facing increasing impacts from fisheries, aquaculture, tourism, energy production, shipping, pollution, climate change and other stressors. This paper discusses the importance of collaborative planning, more than community-based in coastal tourism areas as well as mangrove forest conservation areas, as well as environmental stressors in the form of shrimp ponds. The purpose of this paper is to analyze the understanding of the type of planning approach that is most appropriate, namely collaborative in areas that have spatial conflicts. The method used in this paper is a literature study which describes the theory, findings, and other research materials obtained from reference material to be used as a research basis by compiling a clear framework from the formulation of the problem to be studied. coupled with field observations. The author then provides a review, summary, and dialogue about the theory which is then used to build a relevant theoretical framework. Literature references used are related to collaborative planning and coastal tourism. Based on the discussion that has been done, it can be concluded that to overcome spatial conflicts in the southern coastal tourism area of Yogyakarta, this type of planning with a collaborative approach is the most appropriate to be applied wherein the process involves stakeholders with the ultimate goal of a collective agreement for all parties and with a sustainable perspective.</p> <p>Keywords: <i>collaborative planning, coastal tourism, stakeholder, consensus.</i></p>

Pendahuluan

Degradasi Lingkungan dan Pentingnya Perencanaan yang Baik

Degradasi lingkungan di kawasan pesisir yang dikembangkan sebagai destinasi wisata merupakan isu strategis yang banyak terjadi. Hal ini selain karena faktor ekonomi yang mendorong tumbuhnya industri pariwisata tepi laut yang memang masih menjadi favorit daya tarik wisata, juga akibat dari perencanaan yang tidak komprehensif dan komunikatif. Perencanaan sendiri merupakan arahan untuk melaksanakan sebuah tindakan di masa depan. Pergeseran paradigma perencanaan dari rasional instrumental, yang bercirikan prosedural pragmatis dan bersifat *top down*, kini dengan semakin terbukanya *system* komunikasi dan berkembangnya iklim demokrasi, perencanaan telah berkembang dengan banyak melibatkan *stakeholder* (komunikatif-kolaboratif) yang menghasilkan banyak alternatif. Kawasan pesisir sendiri menawarkan beragam daya tarik baik alam dan budaya (bentang alam dan bentang budaya lokal). Keragaman dan keindahan ini yang menyebabkan kawasan pesisir selalu menjadi alasan untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Pembangunan dan pengembangan kawasan pantai sebagai pendukung aktivitas wisata perlu mempertimbangkan banyak hal agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan budaya setempat serta keberlanjutannya dapat terjaga.

Kawasan Pantai Utara di Pasir Mendit yang berjarak kurang dari 1 km dari Yogyakarta International Airport, memiliki permasalahan penggunaan lahan dari tiga kegiatan utama yaitu pengembangan kawasan hutan

mangrove, kawasan wisata pesisir, dan area tambak udang. Kawasan Hutan Mangrove dikembangkan di sepanjang hilir Sungai Bogowonto yang bertujuan untuk menciptakan barrier penahan ombak dan menciptakan keanekaragaman hayati baru. Keberadaan hutan mangrove ternyata menjadi pemicu munculnya daya tarik wisata baru selain pantai. Bentuk-bentuk arsitektur yang unik menarik banyak wisatawan setiap harinya sehingga kebutuhan akan amenities atau fasilitas wisata juga berkembang yang tentunya membutuhkan spasial tersendiri. Selain itu konflik penggunaan lahan juga terjadi dari banyaknya tambak udang yang merupakan fenomena umum yang dijumpai di sepanjang pesisir pantai selatan Jawa. Walaupun pemerintah daerah DIY telah menerbitkan peraturan yang melarang aktifitas tambak karena merusak lingkungan namun usaha tambak masih marak di pantai selatan Yogyakarta, mulai Kulon Progo hingga Bantul. Hal ini disebabkan selain karena menabrak sempadan pantai juga limbah yang ditimbulkan akan mencemari sungai (sebagai ekosistem hutan mangrove), pantai dan biota yang hidup disana, karena udang butuh air payau yang merupakan habitat yang sama dengan hutan mangrove. Di pantai selatan Bantul, tambak udang mengancam keberadaan gumuk pasir barchan yang dijadikan kawasan lindung Geoheritage oleh Badan Geologi sejak tahun 2014 (National Geographic Indonesia, 2015).

Persada (2018) berpendapat arti penting pembangunan pariwisata khususnya destinasi di wilayah pesisir seharusnya dilandasi dengan perencanaan pariwisata yang mempertimbangkan penggunaan ruang

pada destinasi pariwisata, pendekatan berbasis masyarakat, serta sinergi antar *stakeholders* (pemangku kepentingan) terutama para ahli, dunia industri, pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan seluruh pihak tersebutlah nantinya yang akan menjadikan sebuah destinasi wisata akan mendapatkan perencanaan terbaik dan berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pihak (*stakeholder*) lebih kepada sebuah kawasan wisata pantai memiliki berbagai problematika dari berbagai aspek seperti faktor lingkungan hayati, lansekap budaya, kebencanaan, aksesibilitas, sosial-ekonomi dan lain sebagainya.

Metode

Pada penelitian ini, metode pembahasan yang digunakan adalah *literatur review*. *Literature review* merupakan salah satu metode yang menggunakan sumber-sumber referensi untuk penelitian. Referensi dapat berbentuk buku, tesis/disertasi, artikel jurnal ilmiah dan lain-lain. Dalam *me-review* literatur, makna yang diperoleh tidak sekedar hanya berupa bacaan saja namun bisa secara mendalam dalam mengevaluasi dan mengkritisi terkait penelitian-penelitian yang ada sebelumnya pada topik yang sama. (Sukmadinata, 2009) Literatur ilmiah seperti buku, laporan penelitian, disertasi, jurnal dan sumber internet yang kredibel merupakan referensi yang digunakan dalam paper ini. Referensi mengenai *collaboration planning* dan *coastal tourism* sendiri dimanfaatkan untuk mencari definisi dan ruang lingkup sehingga akan mendapatkan sebuah kerangka teori yang utuh mengenai makna dan arti pentingnya dari perencanaan kalaboratif wisata pesisir. Langkah pertama adalah menggalai makna akar

kata dari *collaboration*, *planning*, *coastal* dan *tourism*. Kemudian menggabungkan kata *collaboration planning* dan *coastal tourism* sebagai sebuah frase yang memiliki arti, sehingga nantinya akan didapat makna kalimat *collaboration planning on the coastal tourism* sebagai pengertian satu kalimat yang utuh.

Kajian Pustaka

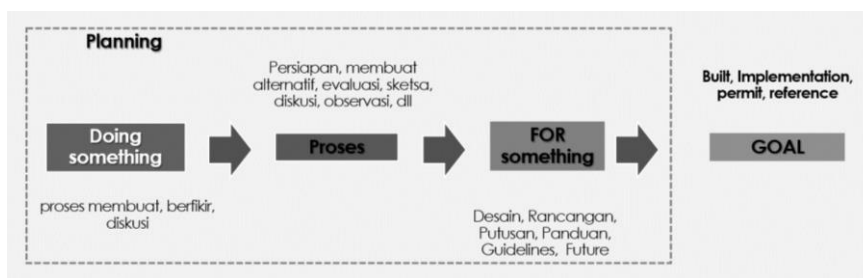
Pentingnya Kerjasama dalam Sebuah Perencanaan

Asal kata *Planning* (Perencanaan) adalah "*plan*" yang memiliki beberapa pengertian dasar yaitu sebuah proposal rinci untuk melakukan atau mencapai sesuatu bisa juga diartikan sebagai niat atau keputusan tentang apa yang akan dilakukan seseorang. (<https://www.lexico.com/definition/plan>, diakses Mei 2021). Secara lebih sederhana diartikan sebagai rancangan; sesuatu yang akan dikerjakan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rancangan>, diakses Mei 2021). Dalam perkembangan ilmu pengetahuan "*planning*" (perencanaan) sendiri telah diambil oleh beberapa bidang ilmu yang telah baku misalnya dalam ilmu perencanaan tata kota (planologi), ekonomi, IT dan yang lainnya. *Planning* memiliki beberapa pengertian yaitu proses membuat rencana untuk sesuatu (N), memutuskan dan membuat pengaturan sebelumnya (V), atau dalam ilmu rancang bangun berarti merancang atau membuat rencana (sesuatu untuk dibuat atau dibangun) (V). Jadi perencanaan merupakan sebuah proses untuk kemudian memutuskan secara detail bagaimana melakukan sesuatu sebelum benar-benar mulai dilakukan (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/planning?q=planning>, diakses April 2021, dan

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/planning>, diakses Mei 2021).

Menurut pandangan beberapa ahli, Waterston (1965) berpendapat bahwa perencanaan diartikan sebagai usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus yang dilakukan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Conyers dan Hill (1984) melihat perencanaan dalam konteks perencanaan pembangunan sebagai proses yang terus menerus berlangsung, yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan

mengenai cara memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan, ditambah oleh Sujarto (1986) dan Branch (1995), bahwa proses perencanaan harus secara rasional dan sistematis dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada serta seefisien dan seefektif mungkin secara berkelanjutan. Yoeti (1997) menambahkan bahwa sebuah perencanaan juga merupakan sebuah mata rantai yang esensial antar pemikiran (*thought*) dan pelaksanaan (*action*).



Gambar 1. Skema kerangka arti kata “*planning*”

Sumber: Analisis penulis, 2021

Mengacu pada pendapat-pendapat ahli tentang perencanaan ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh manusia guna menetapkan pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia. Tujuan penetapan pilihan adalah untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Proses perencanaan meliputi rangkaian kegiatan yang mencakup persiapan, pemilihan alternatif, serta pelaksanaan yang dilakukan secara logis dan sistematis. Hal-hal yang dipilih seharusnya adalah hal yang paling memungkinkan tercapainya tujuan dimaksud yang sesuai dengan kapasitas sumberdaya. Upaya untuk penetapan pilihan perlu mengedepankan sifat kearifan dan juga keilmiahan. Hasil dari penetapan

pilihan ini disebut sebagai rencana. Selain menjelaskan tentang pilihan yang telah ditetapkan, rencana juga memuat penjelasan tentang alasan penetapan dan cara menjalankan pilihan tersebut.

Collaborative: Proses Kerjasama yang Kooperatif

Kolaboratif (*Collaborative*) secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan atau diproduksi secara bekerja sama, melibatkan dua orang atau lebih atau kelompok (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kolaboratif>, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/collaborative>, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/collaborative?q=collaborative>, diakses April 2021).

Suatu proses partisipasi beberapa orang atau kelompok organisasi untuk bekerja sama mencapai hasil tertentu. Secara lebih luas kolaborasi menyelesaikan visi bersama, mencapai hasil positif bagi khalayak yang terlayani, dan membangun sistem yang saling terkait untuk mengatasi masalah dan peluang. Kolaborasi juga melibatkan berbagi sumber daya dan tanggung jawab untuk secara bersama merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program untuk mencapai tujuan bersama. Anggota kolaborasi harus bersedia untuk berbagi visi, misi, kekuatan, sumber daya dan tujuan ([http://www.hunter.cuny.edu/socwork/nrcfcpp/pass/learning-](http://www.hunter.cuny.edu/socwork/nrcfcpp/pass/learning-circles/five/LearningCircleFiveResources.pdf)

[circles/five/LearningCircleFiveResources.pdf](http://www.hunter.cuny.edu/socwork/nrcfcpp/pass/learning-circles/five/LearningCircleFiveResources.pdf), diakses April 2021).

Lebih lanjut kolaboratif merupakan bentuk penataan yang kooperatif diantara dua pihak atau lebih, yang mungkin atau mungkin tidak memiliki hubungan sebelumnya, yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. (Microsoft & Sogeti, 2009). Kata kunci dalam pencarian arti kolaboratif yang muncul dalam beberapa literatur adalah sebuah aktivitas, bekerja bersama (kerja sama), dan proses (terus menerus) untuk menentukan sebuah tujuan ke depan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Skema kerangka arti kata "kolaboratif"

Sumber: Analisis penulis, 2021

Ruang lingkup kawasan pesisir

Coastal atau di dalam Bahasa Indonesia sering diartikan Pesisir, atau kawasan yang berhubungan dengan pantai (*circumlittoral*). *Coastal* digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang ada di laut atau di darat dekat pantai, dari, di, dekat, atau di sepanjang pantai (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/coastal?q=Coastal+>, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coastal>, diakses April 2021). Secara geografis pesisir berupa tanah datar berpasir di pantai (di tepi laut) yang pada bagian basah meliputi daerah antara garis pantai waktu (air) laut surut dan pantai waktu (air) laut

pasang; sedangkan daerah pesisir kering kering adalah area antara garis pantai waktu (air) laut pasang dan garis pantai tertinggi yg dapat dicapai oleh (air) laut pada waktu topan melanda (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesisir>, diakses April 2021). Kawasan pesisir merupakan kawasan peralihan antara darat dan laut yang ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi oleh hempasan percikan air pasang-surut, sedangkan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*). Kawasan pesisir yang ke arah laut masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang

disebabkan oleh aktivitas manusia (Pramudji, 2002).

Dari sudut pandang administratif (dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu) wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Berdasarkan perencanaan batas kawasan pesisir tergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan kawasan pesisir yaitu a. pencemaran dan sedimentasi: suatu kawasan darat dimana dampak pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan memberikan pengaruh terhadap kawasan perairan. b. hutan mangrov: batas terluar bagian hulu kawasan mangrov. Tanda atau batas wilayah pesisir yang dijelaskan dalam teori *Coastal Planning and Management* menurut Kay & Alder (1999) adalah wilayah yang merupakan tanda atau batasan wilayah daratan dan wilayah perairan yang mana proses kegiatan atau aktivitas bumi dan penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan. Kawasan pesisir pada dasarnya merupakan batasan (*Interface*) antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya baik secara bio-geofisik maupun social-ekonomi yang menyediakan barang dan jasa (*Goods and services*) bagi komunitas pesisir dan pemanfaat lainnya (*Beneficiaries*). Untuk lebih mudah memahami batas wilayah

pesisir dapat dilihat dalam gambar 3 berikut:

Sustainable Coastal Tourism

Kata *tourism* yang berarti juga pariwisata, turisme, kepariwisataan, *tour* telah memiliki ragam definisi dari berbagai sudut pandang oleh banyak ahli. Definisi sederhana pariwisata adalah usaha menyediakan layanan bagi orang-orang yang sedang berlibur dan kunjungan ke tempat yang menarik, dengan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan perjalanan oleh sebuah badan komersial yaitu biro wisata

(<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/tourism?q=tourism>,

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tourism>, diakses April 2021). Pariwisata sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam jangka waktu tertentu (sementara waktu, tidak menetap untuk jangka waktu yang lama) dari sebuah tempat ke tempat lain diluar lingkungan kesehariannya yang telah direncanakan sebelumnya (<https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms>, diakses April 2021).

Sektor industri pariwisata di seluruh dunia telah berkembang secara pesat, bahkan di beberapa negara telah dijadikan sektor unggulan dalam penerimaan devisa negara. Keberlanjutan pariwisata dapat tercermin dari sejauh mana perencanaan sebuah destinasi dalam mengelola daya tariknya baik alam, budaya dan infrastruktur pendukungnya. Pariwisata memiliki tujuan yaitu rekreasi atau untuk sebuah kepentingan agar keinginannya bisa terpenuhi (kepuasan). Di Indonesia pariwisata secara khusus juga telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009

tentang kepariwisataan, yaitu berbagai macam sebuah kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu jenis pariwisata menurut Ismayanti (2010), yaitu wisata pantai atau sering disebut *marine tourism/coastal tourism* yang merupakan kegiatan wisata yang berkaitan dengan kawasan pesisir dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk aktifitas berenang, memancing, menyelam (*diving-snorkling*), berjemur, selancar, *canoing*, aktifitas budaya pesisir (misalnya upacara Labuhan di Pantai Parangtritis, Yogyakarta) dan aktifitas berkaitan dengan pesisir lainnya (di laut, pantai, daratan), termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.

Unsur-unsur pengembangan pariwisata menurut Kurniawan, 2015, meliputi adanya atraksi atau daya tarik baik alam (keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, budaya), buatan manusia (mercu suar, desa nelayan, arsitektur rumah tradisional dan sebagainya), ataupun unsur-unsur dan budaya (ritual, adat istiadat, kuliner dan sebagainya). Wang (2019) juga menyebutkan daya tarik wisata di pesisir di antaranya adalah mengeksplorasi karakteristik desa nelayan, melihat aktifitas penangkapan ikan, dan pergi ke pelabuhan perikanan untuk membeli hidangan laut, mencicipi makan malam hidangan laut yang lezat, dan program budaya lainnya untuk dinikmati. Transportasi juga memiliki unsur penting dalam pengembangan pariwisata baik darat, laut maupun udara. Selain sebagai alat angkutan wisatawan menuju destinasi wisata, transportasi khusus wisata di dalam kawasan wisata juga saat ini

banyak dikembangkan sebagai daya tarik tersendiri (misalnya kuda, bendi, sepeda, dan lain sebagainya). Unsur penting lainnya yaitu akomodasi, fasilitas pelayanan dan infrastruktur lainnya.

Menurut United Nations World Tourism Organization (2011), Pariwisata memiliki potensi untuk berkontribusi, secara langsung atau tidak langsung, untuk semua tujuan. Secara khusus, hal ini telah dimasukkan sebagai target dalam tujuan tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan (*Sustainable Consumption and Production/SCP*) dan penggunaan berkelanjutan dari lautan dan sumber daya laut. Pariwisata berkelanjutan diposisikan dengan kuat dalam Agenda 2030. Namun, untuk mencapai agenda ini, diperlukan kerangka implementasi yang jelas, pendanaan dan investasi yang memadai di bidang teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Marafa (2008) berpendapat bahwa pariwisata (dalam bentuk apa pun) merupakan pemain kunci ekonomi, hal itu mendorong interaksi antara proses lingkungan dan sosial ekonomi. Terkadang karena faktor ekonomi lebih kuat, kelestarian lingkungan justru terabaikan. Integrasi antara proses kelestarian lingkungan dan sosio-ekonomi di mana pariwisata berkembang akan membantu “mengembangkan dan memelihara kawasan wisata sehingga tetap dapat bertahan selama jangka waktu yang tidak terbatas (berkelanjutan), dan tidak merusak atau mengubah lingkungan (manusia dan fisik). Karena alam dan budaya yang terjaga itu sesungguhnya sebagai daya tarik utama wisata dimana jika alam dan

budaya rusak atau hilang wisatawan tidak akan lagi ingin berkunjung.

Hasil dan Pembahasan

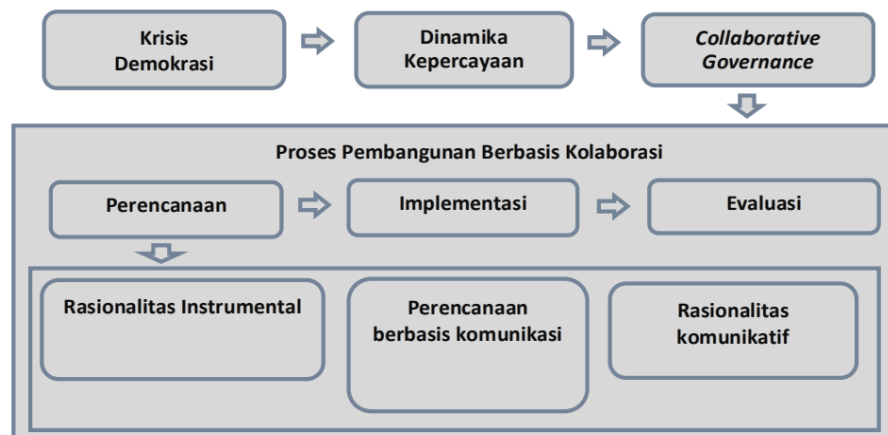
Proses *Collaborative Planning* dan konsensus

Collaborative Planning (Perencanaan Kolaboratif) merupakan sebuah jalan panjang (proses) pembuatan keputusan dimana melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang melihat permasalahan secara kompleks, bekerjasama untuk menggali potensi dan perbedaan secara konstruktif, selanjutnya menyepakati alternatif-alternatif solusi, dan untuk memperoleh sesuatu yang lebih daripada mencari solusi masing-masing (Healey, 1996). Sufianti (2013) mengemukakan bahwa beberapa pendekatan perencanaan, misalnya perencanaan transaktif, perencanaan kolaboratif (Healey, 1996), perencanaan komunikatif, perencanaan deliberatif partisipatif, serta perencanaan konsensus, memiliki karakter yang hampir sama dalam hal pendekatan pentingnya kerjasama dengan dilandasi komunikasi antar pemangku kepentingan. Kerjasama tersebut memerlukan proses yang akan berjalan dengan baik jika terdapat komunikasi aktif didalamnya seperti dialog, bertukar pikiran, berbagi ilmu pengetahuan, sumbang-saran dan semacamnya. Perencanaan kolaboratif memang merupakan perencanaan yang berlandaskan komunikasi (rasionalitas komunikatif). Pengertian kerjasama-komunikatif tersebut diperoleh dari beberapa pandangan bahwa perencanaan kolaboratif merupakan perencanaan yang terfokus dari para pemangku kepentingan, melibatkan *stakeholders* (Healey, 2006) tidak terbatas dengan tempat dan waktu (Graham & Healey, 1999), terdapat

upaya membangun struktur (permasalahan) dan *communicative action* (Habermas, 2009), dan dalam prosesnya melibatkan komunikasi, dialog, dan transaktif (Graham & Healey, 1999). Proses ini merupakan upaya saling transfer ilmu pengetahuan dan pembelajaran antar pihak, sehingga masing-masing mendapatkan pandangan akan potensi-permasalahan yang dihadapi melalui dialog terstruktur. Pada akhirnya akan mendapatkan sebuah kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Innes dan Booher (2010) berpendapat bahwa perencanaan kolaboratif akan berhasil jika ada ketergantungan antar pelaku, dimana proses kolaborasi menggambarkan jejaring kerjasama dalam sebuah kompleksitas, saling ketergantungan, dan adanya dialog otentik didalamnya. Duduk Bersama dan adanya rasa saling ketergantungan dan menghargai (empati) akan menyebabkan keinginan untuk berkompromi, yang akhirnya bisa terjadi hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Pergeseran paradigma dari perencanaan yang bersifat rasionalistik menuju ke arah berkembangnya demokrasi telah menghasilkan konsensus. Walaupun jenis perencanaan ini dimana membutuhkan partisipasi yang terstruktur, serta membutuhkan waktu dan kesabaran hasil yang didapat diharapkan akan lebih baik dan tepat sasaran dalam memecahkan permasalahan. Dialog yang dilaksanakan dalam proses kolaborasi harus merupakan dialog yang otentik, yang dimaksud adalah bahwa masing-masing pihak harus bicara dengan sebuah legitimasi, dengan sungguh-sungguh, membuat pernyataan yang dapat dimengerti oleh pihak lain, dan akurat. Jenis dialog yang demikian ini biasanya akan menghasilkan *creativity*

(kreativitas), *reciprocity* (timbal balik), *relationships* (hubungan), and *learning* (pembelajaran). Proses ini akan menghasilkan nilai yang berarti bagi masyarakat (Ines dan Booher, 200; Forester, 2000). Adapun prinsip penting yang menjadi persyaratan dalam proses kolaborasi adalah

keterwakilan dari para pemangku kepentingan baik yang memberikan dampak maupun yang terdampak, transparansi proses dalam menstrukturkan permasalahan, dan kemampuan seluruh peserta untuk melakukan pengambilan keputusan (Sufianti, 2013).



Gambar 3. Proses pembangunan berbasis kolaborasi dan pergeseran paradigma perencanaan

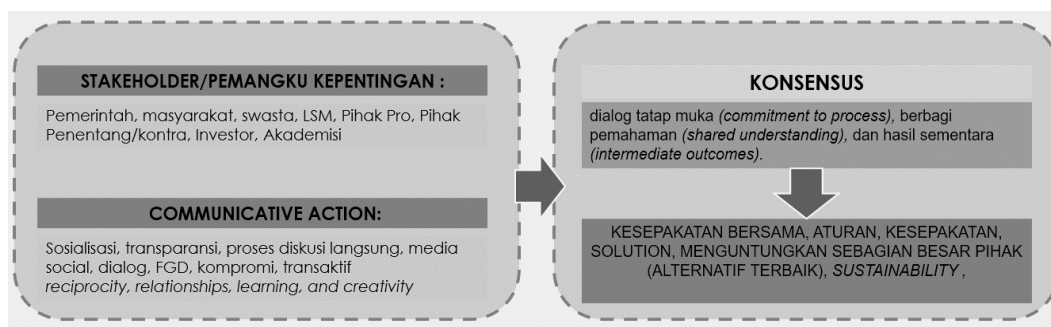
Sumber: Sufianti, 2013

Walaupun dalam realitas pelaksanaan di lapangan, perencanaan kolaboratif dapat berbeda pelaksanaannya, namun tetap mengandung prinsip-prinsip dialog otentik, dan menghasilkan keputusan Bersama (konsensus). Tahapan perencanaan kolaboratif menurut Bertaina, et. al (2006) adalah sebagai berikut: (1) menentukan waktu dialog, (2) menstrukturkan jenis proses yang sudah berhasil, (3) menentukan siapa yang akan terlibat dan berpartisipasi, (4) mengatur proses, (5) menyusun struktur pembuatan keputusan, (6) mengatur peserta bekerja bersama, (7) membagi pengetahuan dan informasi, serta (8) mengimplementasikan kesepakatan yang telah disetujui. Sedikit berbeda dengan tahapan di atas, Gunton dan Day (2003) lebih mendekati perencanaan kolaboratif dengan negosiasi. Negosiasi dibagi dalam tiga

layer yaitu (1) pranegosiasi (meliputi persiapan, mengidentifikasi pihak-pihak pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dan mewakili dalam proses kolaboratif, menyiapkan rencana aturan dasar, tujuan, prosedur, peran dan tanggungjawab, jadwal, dan logistik, serta mengidentifikasi fakta-fakta dan informasi yang relevan yang diperlukan selama proses berlangsung), (2) negosiasi (meliputi identifikasi relevansi pemangku kepentingan, penggunaan prosedur seperti *brainstorming* dan memetakan ide untuk mengkaji alternatif-alternatif solusi yang kompleks, menentukan pilihan-pilihan terbaik yang muncul dan mengupayakan hasil negosiasi ke dalam sebuah “dokumen tunggal” yang menyatukan kelompok-kelompok yang berkepentingan ke dalam sebuah konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota), dan (3) pasca

negosiasi (meliputi penyepakatan hasil yang telah dicapai supaya memudahkan pelaksanaannya dan proses monitoring - mengevaluasi implementasi. Memudahkan jika ada negosiasi ulang yang mungkin diperlukan karena perubahan situasi di masa depan. Mengingat banyaknya konflik spasial yang terjadi di Kawasan pantai selatan Yogyakarta karena berbagai kepentingan, yang terkadang sulit untuk dicari jalan keluarnya, konsep perencanaan dengan

pendekatan kolaboratif dapat diterapkan. Seluruh pihak baik yang pro dan kontra dapat dilibatkan dalam mencari solusi bersama mencari alternatif yang terbaik bagi lingkungan, aspek sosial-budaya dan ekonomi. Penambah udang, pelaku wisata, penggiat lingkungan (konservator mangrove), arsitek, akademisi, *planner*, dapat bekerjasama dalam menemukan kesepakatan bersama (*consensus*) walaupun dapat memakan waktu yang panjang.



Gambar 4. Skema proses Collaborative Planning
Sumber: Analisis penulis, 2021

Pentingnya Mengembangkan Wisata Pesisir yang Berkelanjutan

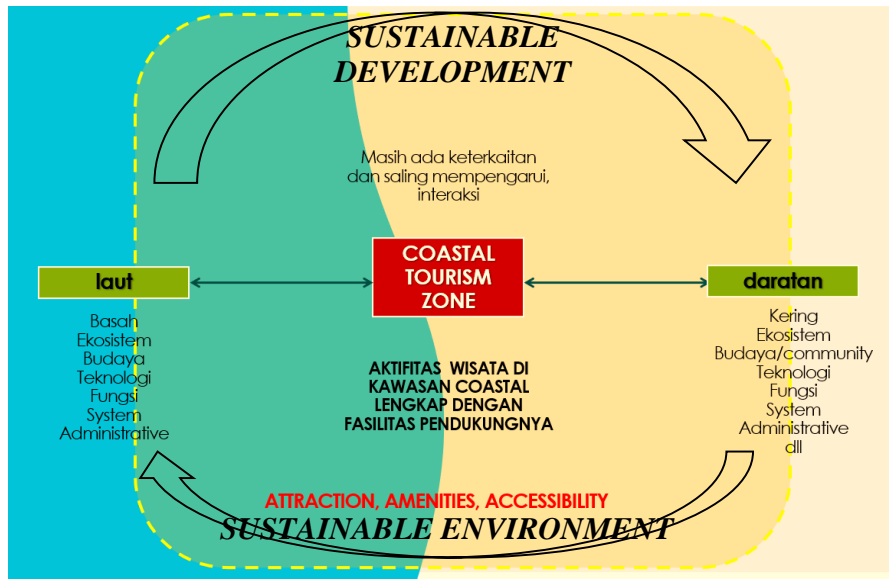
Coastal Tourism adalah sebuah kegiatan wisata/rekreasi dengan memanfaatkan sumber daya (alam, budaya, buatan) yang ada di pesisir (berkaitan dengan pantai atau laut) dengan didukung oleh fasilitas umum, fasilitas wisata (akomodasi, restoran, pedagang, dll), dan infrastruktur terkait (jalan, hub, pasokan air bersih, dll) dengan berbagai tujuan dan pengalaman yang diinginkan. *Coastal Tourism* juga sering disebut *Marine Tourism* atau wisata bahari karena berkaitan dengan zona/Kawasan laut atau pantai. *Marine tourism* telah berkembang menjadi industri yang melibatkan banyak komponen dengan berbagai diversifikasi produknya. Hal ini akan meningkatkan ekonomi lokal (masyarakat) dan regional (APBD).

Wisata pesisir dapat dimanfaatkan dan dikembangkan namun dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan (konservasi ekologi dan budaya). Musaddun, et al (2013) menjelaskan bahwa pariwisata yang berkelanjutan merujuk kepada pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan saat ini dengan tetap menjaga dan meningkatkan kesempatan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dicitrakan menjadi patokan dalam pengaturan sumber daya sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika tercapai, dengan tetap menjaga integritas budaya proses-proses dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya pariwisata berkelanjutan dapat dicapai bila pertumbuhan yang selaras antara

ekologi, ekonomi dan sosial serta instansi-instansi yang terkait. Pariwisata juga membantu masyarakat lokal untuk mempertahankan warisan alam dan budaya mereka yang unik, mendukung konservasi, termasuk melindungi spesies yang terancam punah, tradisi atau norma yang terancam hilang (<https://travel.kompas.com/read/2020/09/27/150300927/sekjen-unwto-di-world-tourism-day--wujudkan-potensi-pariwisata-desa-jadi>, diakses April 2020).

Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan tersebut perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup. Pramudji, 2002 mengemukakan bahwa pengembangan kawasan wisata meliputi kegiatan pembangunan dan pengelolaan obyek beserta sarana dan prasarannya. Pembangunan kepariwisataan khususnya di kawasan pesisir dan bahari pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata bahari yang terdapat diseluruh kawasan perairan Indonesia. Namun untuk pengembangan wisata tersebut perlu kecermatan dan keseriusan penanganan, karena bersifat alami, sehingga perencanaannya memerlukan koordinasi dan integrasi dan semua instansi terkait. Wisata bahari umumnya mempunyai sifat yang khusus dengan lokasi yang luasnya relatif terbatas, sehingga perlu dipikirkan daya dukung lingkungan untuk membangun fasilitas

penopangnya. Wang (2019) menambahkan bahwa sebelumnya dalam proses pengembangan sumber daya wisata bahari, belum ada perencanaan strategis pembangunan berkelanjutan secara ilmiah, dan ketidakteraturan pembangunan menyebabkan rusaknya lingkungan ekologi wisata bahari. Mengambil contoh di Provinsi Hainan, China pada akhir tahun 2017, Pulau Hahira dan Riyuewan, adanya kegiatan reklamasi secara ilegal, menyebabkan fitur ekologi alami garis pantai hancur. Terumbu karang skala besar dan cangkang mentega putih terpengaruh, sebagai sumber daya pariwisata telah hancur dalam skala besar. Kurangnya perencanaan ilmiah dan rasional, dan hanya mengejar keuntungan menjadi permasalahan degradasi lingkungan di Kawasan wisata. Untuk itu dalam pengembangan wisata bahari, perlu ditekankan wawasan pembangunan berkelanjutan pada khususnya kepada sumber daya alami dan budaya, karena jika daya tarik alam dan budaya ini rusak atau hilang otomatis wisatawan tidak akan tertarik lagi untuk berkunjung di destinasi wisata tersebut. Kami juga dapat dengan giat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi wisata bahari, menggabungkan teknologi tinggi modern dan budaya kelautan, membangun taman bio-industri kelautan, dan menggabungkan lembaga penelitian kelautan, museum kelautan, dan hotel bertema laut untuk membuat pengunjung merasa lebih intuitif tentang laut. pariwisata. Pesona lautan menjadi kunci untuk membuka pintu pariwisata yang menggembirakan dan membantu pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.



Gambar 5. Skema Sustainable Coastal Tourism

Sumber: Analisis penulis, 2021

Kesimpulan

Perencanaan kolaboratif di dalam pengembangan wisata pesisir (*Collaboration Planning in Coastal Tourism development*) dapat distrukturkan menjadi sebuah pengertian yaitu sebuah perencanaan di kawasan wisata pesisir dengan ruang lingkup wilayah yang masih terdapat keterkaitan ekosistem pantai baik bentang alam, flora-fauna dan budaya dimana berkembang pula atraksi, aksesibilitas dan amenities sebagai pendukungnya. Permasalahan yang sangat kompleks, multi sektor dan multi aspek serta multi wilayah, maka dibutuhkan perencanaan kolaboratif sebagai proses menuju perencanaan yang terintegratif dalam pengembangan wisata pesisir sehingga membutuhkan banyak pihak dalam proses perencanaan dan mencari solusi ke masa depan. Proses pembuatan keputusan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) utamanya adalah akademisi-ahli dalam bidang tertentu, pemerintah, swasta

(pengusaha), masyarakat dan media dengan melihat permasalahan dari berbagai sudut, bekerjasama untuk menggali perbedaan secara konstruktif, kemudian mencari solusi, dan untuk mendapatkan beberapa alternatif terbaik. Perencanaan kolaboratif merupakan perencanaan berbasis komunikasi dimana semua yang terlibat secara aktif memberikan sumbang saran, masukan dan solusi. Perencanaan kolaboratif juga mensyaratkan adanya transfer pengetahuan agar seluruh pihak memahami dan mengerti permasalahan yang dihadapi, ilmu pengetahuan yang melingkupi dan solusi yang akan dicari. Hasil akhir dari perencanaan kolaboratif ini adalah sebuah kesepakatan bersana (*konsesnus*) yang merupakan alternatif terbaik untuk semua pihak dan lingkungan yang berkelanjutan. Kolaborasi juga merupakan salah satu sarana penting untuk memajukan kesejahteraan kolektif para pemangku kepentingan di kawasan pariwisata pesisir.

Daftar Pustaka

- Bertaina, et. al. (2006) Study for the State Trust Lands Partnership Project of the Sonoran Institute and the Lincoln Institute of Land Policy. *Building Trust: Lessons From Collaborative Planning on State Trust Lands*.
- Branch, M. C. (1995). *Perencanaan kota komprehensif : pengantar dan penjelasan. terjemahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Conyers, D. & Hills, P. (1984). An introductory to development planning in third world. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
- Graham, S. & Healey, P. (1999). Relational concepts of space and place: issues for planning theory and practice. *European Planning Studies*, 7, 623-646.
- Habermas, J. (2009). *Teori tindakan komunikatif, rasio dan rasionalisasi masyarakat*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Healey, P. (1997). *Collaborative planning: shaping places in fragmented societies*. London: Palgrave Macmillan.
- Healey, P. (1998). Collaborative planning in a stakeholder society. *The Town Planning Review*, 69, 1-21.
- Healey, P. (1992). Planning through debate: the communicative turn in planning theory. *The Town Planning Review*, 63, 143-162.
- Healey, P. (2006). *Collaborative planning, shaping places in fragmented societies*, Bloomsbury: Red Globe Press.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar pariwisata*. Jakarta: Gramedia Widisarana.
- Innes, J. E. & Booher, D. E. (2010). Beyond collaboration democratic governance for a resilient society. *Planning with Complexity, An Introduction to collaborative rationality or public policy*, pp 196-215., Routledge, Oxon.
- Kay, R. & Alder, J. (1999). *Coastal planning and management*. London: CRC Press.
- Kurniawan, W. (2015). *Dampak sosial ekonomi pembangunan pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Marafa, L. M., Integrating sustainable tourism development in coastal and marine zone environment. *Études caribéennes [Online]*, 9-10.
- Microsoft & Sogeti. (2009). *Collaboration in the cloud – how cross-boundary collaboration, is transforming business*. Groningen: LINE UP boek en media bv.
- Musaddun, Kurniawati, W., Dewi, S. P., Ristianti, N. S. (2013). Bentuk pengembangan pariwisata pesisir berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ruang*, 1, 261-270.
- Persada, C. (2018). *Perencanaan pariwisata dalam pembangunan wilayah berkelanjutan, teori dan praktik*. Bandar Lampung: LPPM Universitas Bandar Lampung.
- Pramudji, (2002). Pengelolaan kawasan pesisir dalam upaya pengembangan wisata bahari, *Oseana*, 28, 27-35.
- Sufianti, E., Sawitri D., Pribadi, K. N., Firman, T. (2013). Proses kolaboratif dalam perencanaan berbasis komunikasi pada masyarakat nonkolaboratif. *MIMBAR*, 29, 133-144.
- Sujarto, D. (1986). *Kosolidasi lahan perkotaan sebagai suatu model pengelolaan lahan*. Bandung:

- Jurusan Teknik Planologi FTSP-ITB.
- Sukmadinata, N. S. 2009. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 *tentang kepariwisataan*. 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966. Jakarta.
- United Nations World Tourism Organization. (2011). *Tourism towards 2030 / global overview*. World Tourism Organization.
- Wang, L. & Zhang, H. (2019). The impact of the marine tourism resources development on the sustainable development of marine economy. *Journal of Coastal Research*. 94, 589–592.
- Waterston, A. (1965). *Development planning: lessons of experience*. Maryland: The Johns Hopkins Press.
- Yoeti, O. A. (1997). *Perencanaan dan perkembangan pariwisata*. Jakarta: Penerbit PT Pradyanta Paramita.